MUNDUR DARI BURSA BALON BUPATI

Najib Alihkan Dukungan ke Muslimatun

KR-Saifullah Nur Ichwan

Najib bersama Muslimatun.

SLEMAN (KR) - Kabar mengejutkan datang dari Dr Najib A Gisymar SH MHum. Balon Bupati Sleman yang sebelumnya gencar mendaftar di beberapa partai politik justru mundur dari bursa pencalonan dan mengalihkan dukungannya ke Sri Muslimatun.

"Saya resmi mundur dari bursa balon bupati. Kemudian saya akan mendukung Bu Sri Muslimatun untuk maju sebagai calon bupati," kata Najib kepada *KR*, Senin (20/7).

Alasan Najib mundur dari bursa cabup karena merasa peta politik di Sleman belum kondusif. Di mana untuk maju sebagai calon kepala daerah yang hanya mengandalkan ide kreatif ternyata belum cukup. "Selain itu, kemungkinan di Sleman ini akan terjadi dua kubu yaitu Kustini Sri Purnomo dan Sri Muslimatun. Untuk itu saya akan memberikan dukungan ke Sri Muslimatun," terangnya.

Menurut Najib, dirinya telah bekerja dan turun ke masyarakat sejak Juni 2019 hingga Juli 2020. Kemudian melakukan konsolidasi dengan beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman.

Sedangkan Sri Muslimatun mengaku berterima kasih terhadap Najib yang telah memberikan dukungan ke dirinya. Dukungan itu diharapkan dapat memperkuat kekuatan dalam Pilkada nanti. **(Sni)** -d

DINILAI BERTENTANGAN DENGAN SK DPP

Langkah PDIP Merekomendasi Kustini Tuai Polemik

SLEMAN (KR) - Langkah PDI Perjuangan melamar Kustini maju sebagai calon Bupati Sleman menuai polemik di internal partai. Terlebih pernyataan Ketua DPC PDIP Sleman Koeswanto mengungkapkan tidak adanya kader internal yang berani maju.

Salah satu kader PDIP Riyanto Kuncoro yang sudah memasukkan formulir menjadi bakal calon bupati melalui jalur DPP PDIP mengaku kecewa karena PDIP justru merekomendasikan seseorang dari luar partai. Bahkan dalam pernyataan yang sudah tersebar di media massa, Ketua DPC PDIP Sleman dinilai meremehkan para kader internal dari PDIP.

"Saya awalnya sudah mendaftar menjadi bakal calon wakil bupati dari jalur DPC PDIP. Kemudian saya revisi menjadi bakal calon bupati di tingkat DPP PDIP," terang Riyanto Kuncoro kepada wartawan, Senin (20/7).

Menurut Riyanto, beberapa pernyataan Ketua DPC PDIP Sleman ini dinilai sebagai upaya pembunuhan karakter kader. Padahal beberapa kader PDIP di Sleman termasuk dirinya sudah mendaftar di tingkat DPC. "Saya mengindikasikan, selaku Ketua DPC Sleman memanipulasi informasi kepada publik bahwa tidak ada kader PDIP Perjuangan yang mendaftar atau mampu," ungkap Riyanto.

Langkah PDIP merekomendasikan seseorang dari luar parpol ini juga dinilai bertentangan dengan SK DPP, yakni syarat mutlak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA). Selain itu sesuai ketentuan AD ART partai, ada kebijakan harus magang di partai selama 6 bulan. "Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bisa diartikan sudah berat karena menyangkut ideologi dan idealisme partai. Saya berharap kepada pengurus DPP PDIP untuk memberikan sanksi, jangan hanya di internal partai tapi juga melalui media massa," tandasnya.

Riyanto mengaku, turunnya rekomendasi seseorang dari luar partai ini membuat gerah orang-orang lama di PDIP. Hal ini juga membuat kader di tingkat bawah cukup bergejolak.

Dihubungi terpisah, Ketua DPC PDIP Sleman Koeswanto menerangkan, terkait rekomendasi PDIP terhadap Kustini, kebijakan ini berdasarkan pengalaman Pilkada 2015. PDIP hanya memperoleh suara 30 persen. "Apa perlu memaksakan, pengalaman itu buat pelajaran, jika memaksakan sama saja bunuh diri. Harus menang minimal 60 persen. Dengan cara menggandeng yang lain walaupun bukan dari dalam partai. **(Aha)-d**

ADAKAN 'FIT AND PROPER TEST'

Gerindra Tak Mematok Mahar Politik

SLEMAN (KR) - Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, DPC Partai Gerindra Sleman tak akan mematok mahar politik. Namun calon yang diusung harus bisa memenangkan kontestasi Pilkada.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptono, Senin (20/7) usai menggelar *fit and proper test* di Kantor DPC Gerindra Sleman. Sebanyak tujuh calon mengikuti tahapan tersebut yakni Amin Purnomo SH, Dr Najib A Gisymar SH MHum, Dra Hj Sri Muslimatun MKes, Reno Candra Sangaji SIP, Dra Hj Kustini Sri Purnomo, Ir H Dzit Khaeroni dan Dani Eko Wiyono ST MT.

"Secara bergantian mereka kami wawancara berkaitan keberadaan Sleman, situasi politik di Sleman. Selain itu juga kami tanyakan tentang komitmen mereka jika nanti diusung," jelas Sukaptono.

Dalam *fit and proper test* akan ada penilaian dari Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah Partai Gerindra Kabupaten Sleman. Hasil tes akan dikirim ke DPD untuk dilanjutkan ke DPP Gerindra. "Nanti hasilnya akan dikirim ke DPP melalui DPD. Setelah itu kami tinggal menunggu rekomendasi dari DPP, siapa yang akan diusung dalam Pilkada 2020 nanti," ujarnya.

Sukaptono juga menegaskan tidak akan mematok mahar politik terhadap calon yang akan diusung. Namun pihaknya menargetkan calon yang diusung harus bisa memenangkan Pilkada. "Yang jelas kami tidak akan mematok mahar politik. Tapi calon yang akan kami usung harus sesuai visi dan misi Partai Gerindra dan bisa memenangkan Pilkada," tegasnya.

Untuk maju dalam kontestasi Pilkada, Gerindra memang tidak bisa maju sendiri karena hanya memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Sleman. Sejauh ini sudah melakukan komunikasi dengan partai politik. "Semua partai yang ada di dewan sudah ada komunikasi dengan kami. Tapi sampai saat ini belum ada titik. Tapi yang jelas, kami harus koalisi jika ingin maju," kata Sukaptono.

Sementara Reno Candra Sangaji optimis mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Menurutnya, untuk bisa mendapatkan tiket sebagai calon bupati (Sleman 1) minimal butuh 12 kursi dan waktu yang tersedia untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai masih sangat memungkinkan.

Begitu pula Kustini yang telah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan yakin mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Dirinya juga terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain, karena PDI Perjuangan terbuka untuk mendapat dukungan dari partai lain. **(Sni/Dev)-d**

Baznas Sleman Bantu Penanganan Covid-19

KR-Ivan Aditya

Kriswanto menyerahkan cenderamata kepada Ahmad Lutfie.

SLEMAN (KR) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman melalui Program Sleman Peduli menyalurkan bantuan tahap II. Program ini dilaksanakan pada bulan Juni - Juli dengan menitikberatkan bantuan pada penanganan Covid-19, senilai Rp 998.088.000.

Ketua Baznas Sleman Kriswanto MSc mengatakan, dua bulan terakhir ini penyaluran bantuan dilakukan dalam upaya menangani Covid-19. "Bantuan yang diberikan di antaranya berupa paket sembako untuk para takmir dan guru ngaji, pembagian masker di jalan-jalan protokol, pengadaan thermogun di masjid-masjid, hingga pemasangan wastafel di kantor kecamatan, kodim, koramil serta polsek-polsek," ujarnya saat bersilaturahmi di Kantor Redaksi *KR* yang diterima Wapemred Ahmad Lutfie, Senin (20/7).

Turut hadir pula Ketua Bidang Penghimpunan Asmuni Muhammad Thohir, Ketua Pentasyarufan dan Pendayagunaan Muhamad Iskandar, Ketua Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Muhyi Darmaji, Administrasi dan Sumberdaya Djumroni, serta Staff Arif Hidayat. **(Van)-d**

422 Anggota Korpri Terima Tali Asih

SLEMAN (KR) - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Sleman menyerahkan tali asih bagi 422 anggota Korpri Pemkab Sleman yang telah purna tugas, Senin (20/7) di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman. Penyerahan tali asih dilakukan simbolis oleh Bupati Sri Purnomo kepada lima orang perwakilan anggota Korpri yang telah purna tugas pada periode 1 Januari sampai dengan 1 Juli tahun 2020.

Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Sleman Pustopo mengatakan, penyerahan tali asih tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi anggota Korpri yang telah purna tugas. "Penyerahan tali asih sebagai penghargaan, penghormatan dan apresiasi atas pengabdian serta dedikasi aparatur yang telah bekerja dan mengabdikan dirinya di Pemkab Sleman," katanya.

Pustopo menambahkan, penyerahan tali asih dilakukan secara bertahap selama empat hari dengan setiap harinya kurang lebih sebanyak 100 orang. Anggota Korpri purna tugas tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 372 orang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 4 orang dan Perangkat Desa sebanyak 46 orang dengan nominal uang Rp 1 juta untuk PNS dan Rp 500.000 untuk perangkat desa.

Sedang menurut Bupati Sri Purnomo, penyerahan tali asih menjadi sarana silaturahmi antara Pemkab Sleman dengan para purna tugas. "Meskipun sudah memasuki masa purna tugas, Pemkab Sleman masih sangat mengharapkan sumbangsih pemikiran, ide, masukan dan sumbangan tenaga agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di Sleman dapat dilakukan secara lebih optimal lagi," pintanya. **(Aha)-d**

SATGAS COVID METRO NGEPOS

Bagikan Sembako, Masker dan Hand Sanitizer

TEMPEL (KR) - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergaya hidup bersih dan sehat menghadapi kebiasaan baru, Satgas Covid-19 Metro Ngepos Lumbungrejo Tempel membagikan masker dan hand sanitizer bagi masyarakat. Pembagian 250 paket hand sanitizer dan masker dilaksanakan, Minggu (19/7) di Pasar Tempel, tak jauh dari lokasi Posko Covid-19 Metro Ngepos. Selain masker dan hand sanitizer, relawan yang terdiri dari warga Metro Ngepos pun turut membagikan paket sembako.

"Ini merupakan yang keempat kalinya kami melakukan aksi sosial. Dengan harapan, masyarakat semakin sadar untuk mengenakan masker, rajin mencuci tangan dan jaga jarak demi mencegah penularan Covid-19," tegas Sri Barata, Ketua Satgas Covid-19 Metro Ngepos.

Sembako dibagikan untuk masyarakat sekitar yang terdampak Covid-19, mengingat efek pandemi ini begitu besar, terutama bagi ekonomi warga. **(Yud)** -d

KR-Antri Yudiansyah

Pemberian sembako secara simbolis oleh Satgas Covid-19 kepada warga.

Pendamping PKH, Perpanjangan Tangan Pemerintah Entaskan Kemiskinan

SLEMAN (KR) - Kementerian Sosial RI pada tahun 2020 mempunyai target untuk menggradusi 1 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). KPM adalah Penerima Bantuan di Program Keluarga Harapan.

KR-Istimewa

Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kemensos RI Prof Syahabuddin memberi sambutan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kemensos RI Prof Syahabuddin saat membuka Diklat Elearning Family Development Session (FDS)/P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) Pendamping PKH di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Senin (20/7).

Pendamping PKH adalah perpanjangan tangan Pemerintah dalam rangka Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Pendamping menjadi tentara bagi Kemensos dalam rangka memerangi kemiskinan, namun senjata para pendamping PKH adalah ilmu. Ilmu itulah yang akan digunakan untuk membuka pemikiran dan pengetahuan para KPM untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Yang pada akhirnya Para KPM akan tergraduasi lulus dari PKH dan lepas dari kemiskinan.

Menurut Humas BBPPKS Yogyakarta Anis Rahmawati, Diklat elearning FDS/P2K2 Pendamping PKH menjadi salah satu upaya Kemensos meningkatkan kompetensi dan Pengetahuan Pendamping PKH. BBPPKS Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial menjadi Lembaga yang mendidik dan melatih SDM Kesejahteraan Sosial termasuk Pendamping PKH.

BBPPKS Yogyakarta memiliki wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa tenggara Barat. Pelaksanaan Diklat e learning FDS/P2K2 Gelombang 3 ini dilaksanakan 20 sd 30 Juli 2020 secara online. Peserta diklat sebanyak 120 peserta dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peserta dibagi menjadi 14 kelas dan masing masing kelas diampu oleh seorang Fasilitator yang merupakan Widyaiswara BBPPKS Yogyakarta. Selama 10 hari peserta akan menerima materi mengenai Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Pengelolaan Keuangan Keluarga, Kesehatan dan Gizi, Perlindungan Anak, Disabilitas dan lanjut Usia.

Selanjutnya setelah mengikuti diklat Para pendamping PKH wajib menyampaikan materi-materi tersebut kepada para KPM. Di sinilah Peran Pendamping PKH bertugas menyampaikan berbagai informasi FDS dengan kultur atau budaya masyarakat setempat. **(*)-o**